

KAJIAN TENTANG WANITA DAN PERUBAHAN PERDESAAN

(Studies on Women Issues and Social Change in Rural Areas)

Istiana HERMAWATI

Abstract Green revolution and industrialization in villages that being discourse of development in order ORBA, proven already replace and marginalized women in village from their economic and social function. Because of that, their poor life become very poor, full of problems and succceptible for domination of man and another external force in system and stucture of social, economic, politic and culture was growth in village. That is discribe gender inequality in public policy by government. Because of that, very important to make positive restructurization for social position of women in village through asistance program as technology asistant that relevant, to lighten their load work, and education and training for the operasionalization. Assistance for women villages by Government Organization (GO) and Non Government Organization (NGO) so it can insure women rights, developed their capacity with maximize, so their aspiration and perseption can accomodation and making of colour for development. So with that effort, in role and function of women will be increase and because of it, their participation in development also become large. With another word, development consider aspects and interest of women then gender distortion and inequality in development would be avoided and minimized.

Kata Kunci: Perubahan pedesaan, diskriminasi, revolusi hijau

1. PENDAHULUAN

Secara tradisional, wanita pedesaan yang hidup di sektor pertanian memegang peranan yang cukup signifikan di dalam kegiatan produksi, konsumsi dan investasi. Namun akibat dari penerapan strategi perekonomian nasional dan internasional (yang secara esensial merupakan penerapan pembangunan ekonomi kapitalis/hegemoni pembangunan barat), maka wilayah pedesaan di Asia Tenggara beserta komunitasnya mengalami transformasi yang cepat dalam organisasi teknis dan

sosial mereka. Perubahan tersebut secara eksplisit dapat dilihat dari perubahan agraris, migrasi dan urbanisasai, birokrasi dan industrialisasi yang mewarnai kehidupan masyarakat.

Perubahan sebagaimana disebut di atas, secara mendasar sangat merugikan wanita. Dalam sistem tradisional, wanita punya andil yang besar untuk memanen hasil pertanian dengan peralatan sederhana seperti ani-ani dengan sistem bagi hasil (*bawon*), yang secara kuantitatif melibatkan banyak tenaga kerja wanita; untuk mengumpulkan hasil pertanian; dan

untuk menumbuk padi dengan upah yang cukup memadai, dimana upah tersebut dapat memberikan penghidupan bagi keluarganya. Tetapi dengan masuknya teknologi dan mekanisasi pedesaan, semua peran itu menjadi hilang, karena semua pekerjaan tersebut digantikan oleh peralatan modern yang hanya membutuhkan tenaga kerja relatif sedikit dan mayoritas adalah pria. Akibatnya, banyak wanita yang termarginalisasi dan kehilangan mata pencaharian serta menjadikan kehidupannya yang sudah miskin menjadi semakin miskin. Akibat lebih lanjut dari kondisi ini adalah banyak wanita dan anak-anak di pedesaan mengalami malnutrisi dan kekurangan gizi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, banyak wanita mencari alternatif pekerjaan lain, seperti berdagang kecil-kecilan; menjual tenaga mereka meskipun dengan upah yang rendah; bahkan tidak jarang wanita pedesaan ini terpaksa harus menjadi pekerja seks komersial, semata-mata hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya, karena tidak ada alternatif kerja lainnya untuk dipilih. White (1980) dan King (1976) dalam studinya menyimpulkan, bahwa beban kerja wanita pedesaan sangat berat karena jam kerja wanita untuk pekerjaan domestik dan mencari nafkah lebih panjang dibandingkan pria. Tetapi sangat disayangkan bahwa upah kerja yang mereka terima sangat rendah dibanding pria, sehingga wanita pedesaan pada umumnya berada pada keadaan miskin dan terbelakang. Kendatipun rendah, penghasilan wanita ini sangat berarti bagi keluarganya. Hal ini jelas terlihat pada keluarga miskin, dimana penghasilan suaminya sangat

kecil dan tidak menentu atau tanpa penghasilan sama sekali, maka kontribusi penghasilan wanita terhadap penghasilan keluarga ini sangat signifikan.

Di samping jam kerja wanita lebih panjang di bandingkan pria, dan dengan perbedaan upah yang sangat menyolok, diskriminasi (pemarginalan) terhadap wanita ini juga terjadi dalam banyak hal, seperti dalam pemilihan aset tanah, pengambilan keputusan dalam keluarga maupun dalam kegiatan lainnya, kesempatan memperoleh pelatihan dalam pemakaian teknologi baru, aset memperoleh kredit, pengendalian produksi pertanian, posisi sosial dan sebagainya yang selalu mengutamakan pria dan menomorduakan wanita, atau bahkan mengabaikannya sama sekali. Hal ini menggambarkan adanya ketidakadilan gender dalam pelaksanaan pembangunan di sebagian besar negara berkembang, termasuk di Indonesia.

2. KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI NEGARA BERKEMBANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP WANITA PEDESAAN

Pembicaraan tentang perubahan di pedesaan dan dampaknya terhadap wanita, tidak terlepas dari konteks *Developmentalisme* dan revolusi hijau (*green revolution*) yang dikenalkan negara Barat pada negara dunia ketiga pada tahun 50-an. Konsep *developmentalisme* ini untuk pertama kali dikernalkan oleh Presiden Amerika Hary S Truman pada 20 Januari 1949, dan sejak saat itulah konsep *developmentalisme* secara resmi digunakan. Jadi apa yang dimaksud

dengan developmentalisme tiada lain merupakan refleksi dari paradigma Barat tentang perubahan sosial, yakni langkah-langkah menuju "*Hyger Modernity*". Asumsi dasar dari modernisasi ini adalah bahwa tradisi adalah masalah dan harus ditransformasikan seperti apa yang dialami Eropa dulu.

Modernisasi ini diterjemahkan dalam bentuk teknologi dan pertumbuhannya mengikuti jejak negara-negara industri yang mengacu pada revolusi industri. Jadi modernisasi ini berkonotasi dengan sekularisasi, industrialisasi, perusahaan nasional serta partisipasi masa dalam melaksanakannya. Bertitik tolak dari hal ini, maka modernisasi ini menjadi dasar dari developmentalisme/ pembangunan yang dilaksanakannya. Pembangunan ini sendiri lebih dimaksudkan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat yang ada pada negara dunia ketiga. Untuk melaksanakan pembangunan ini, maka dirumuskanlah beberapa teori seperti metafora pertumbuhan organis (teori pertumbuhan linear, menurut WW Rostow, 1960), Teori motif berprestasi (N-Ach) oleh David Mc, Clelland (1961), dan sebagainya.

Dalam kenyatannya, modernisasi dan developmentalisme ini tidak berbeda dengan konsep kapitalisme. Dalam perspektif inilah sesungguhnya revolusi hijau (*green revolution*) sebagai suatu bentuk industrialisasi dan modernisasi pertanian yang sepenuhnya menggunakan logika pertumbuhan diperkenalkan di pedesaan. Program ini diperkenalkan oleh USA kepada negara dunia ketiga sebagai pelaksanaan teknis developmentalisme dan merupakan suatu strategi untuk melawan

paradigma tradisional yang terdapat di pedesaan. Jadi revolusi hijau dengan teknologi dan mekanisasi ini tiada lain merupakan suatu hegemoni Amerika terhadap pertanian di negara sedang berkembang. Program ini didukung oleh pusat penelitian global raksasa seperti I (the IRRI) di Philipina dan *International Maize and Wheath Improvement Centre* (CIMMYT) di Mexico, serta 13 lembaga riset lainnya di dunia. Revolusi ini telah menggusur sistem pertanian tradisional serta merampas kontrol atas sumber tanaman dari petani dunia ketiga ke teknokrat Barat di CIMMYT, IRRI dan bibit multinasional (Morgan, D, 1979; dalam Sunanto dkk, 2000).

Revolusi hijau ini menurut Fakhri (2000), dimaknai sebagai suatu program yang merupakan kombinasi pengetahuan dan diskursus pertanian, teknologi pertanian, kebijakan politik pertama yang dikembangkan di atas kelas masyarakat dalam suatu formasi sosial kapitalistik di pedesaan dunia ketiga. Sebagai bentuk baru model kapitalisme pertanian revolusi hijau merupakan hegemoni yang berpengaruh di dalam proses yang sangat singkat, dan program ini dapat merubah gaya hidup, sikap dan prinsip-prinsip petani. Program ini relatif berhasil karena didukung oleh lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia dalam mendorong integrasi produsen pedesaan dan pasar nasional serta internasional melalui bantuan dana yang dipinjamkannya. Atau dengan kata lain, Heyter (1985) mengatakan bahwa lembaga internasional ini mengadvokasi integrasi negara selatan pada pasar dunia dan meningkatkan ketergantungan mereka. Dan legalitas dari pemerintah yang mewajibkan dilaksanakannya program ini di dalam program-program pembangunan

mempersempit bahkan meniadakan masyarakat pedesaan untuk membuat pilihan lain, selain melaksanakan program revolusi hijau ini kendatipun tidak sepenuhnya memahami maksud dan tujuannya.

Dari dimensi gender, revolusi hijau ini ternyata melanggengkan dominasi dan penindasan kaum perempuan negara selatan. Dengan masuknya teknologi dan mekanisasi pertanian, kaum perempuan tidak hanya tergusur dari peran mereka di sawah karena digantikannya ani-ani dengan sabit dan mesin lainnya, tetapi karena adanya anggapan bahwa, lelaki adalah pemimpin rumah tangga, sehingga banyak program revolusi hijau tidak menyentuh kaum perempuan, seperti dalam training maupun perkreditan. Shiva (1989), menambahkan bahwa program tersebut berhasil menyingkirkan perempuan dengan teknologi yang dikontrol oleh pria. Akibat dari perbedaan gender yang menyertai pelaksanaan revolusi hijau ini adalah makin bertambah miskin dan terpuruknya perempuan pedesaan, karena program-program pembangunan yang dilaksanakan digeneralisasikan dan lebih bersifat universal serta mengabaikan hak-hak dan kepentingan mereka. Harijani (2001), menambahkan bahwa perempuan pedesaan lebih dipandang sebagai objek daripada subyek pembangunan, sehingga keadaannya menjadi miskin dan makin terpuruk. Dan untuk memperoleh hak-haknya, perempuan kelas bawah ini harus berjuang lebih keras lagi dibanding sebelumnya.

Mosse (1993) dalam bukunya yang berjudul *Gender dan Pembangunan* (edisi Indonesia, 1996) juga menyimpulkan hal yang sama, yaitu :

“Bahwa pembangunan yang dilaksanakan di negara sedang berkembang kurang menjangkau kelompok termiskin dalam masyarakat (dalam hal ini perempuan berpendapatan rendah), dan sering tidak mempertimbangkan atau mengabaikan mereka. Akibatnya, perempuan mengalami kemiskinan yang lebih parah dibanding laki-laki yang berpenghasilan rendah dalam komunitasnya, khususnya perempuan yang mengepalai rumah tangganya sendiri. Walaupun petani laki-laki miskin, penyewa tanah dan laki-laki yang tidak memiliki tanah secara geografis, sosial dan kultural seringkali terisolasi dari upaya pembangunan, perempuan dari kelompok sosial ekonomi yang sama cenderung masih buruk keadaannya, dan terjauhkan dari peluang untuk memperbaiki basis mata pencahariannya. Mereka tidak memiliki akses terhadap sumber pembangunan, misalnya terhadap kredit atau perhatian para pekerja secara luas, kesenjangan gender melahirkan kendala bagi partisipasi sosial mereka yang setara dan kehadiran organisasi yang kokoh untuk mewakili kepentingannya membuat mereka tidak mampu membangun suara atau menjadikannya di dengar. Dalam pelaksanaan pembangunan, kondisi perempuan pedesaan di Negara sedang berkembang ini semakin memburuk. Dan saat resesi melanda, kaum perempuan miskin ini yang paling terhempas, karena mereka adalah orang yang bertanggungjawab untuk memberi makan, pakaian dan mendidik anak-anak dengan sumber yang terus terpuruk. Saat pemerintah berjuang dengan IMF untuk melakukan penghematan dengan memotong anggaran kesejahteraan,

kaum perempuanlah yang harus menanggung beban lebih banyak. Kaum perempuan harus memikul beban yang tidak seimbang akibat kerugian karena gagalnya pembangunan" (Mosse, 1996: 26-27).

Beban kerja perempuan pedesaan ini seraca eksplisit tersirat dari jam kerja yang dicurahkan, baik untuk pekerjaan domestik maupun pekerjaan mencari nafkah. Menurut *Survey Women in Development (WID)* sebagaimana dikutip Arief (2000), menyimpulkan bahwa perempuan memberikan 66 % dari jam kerjanya tetapi hanya mendapat 10 % dari upahnya. Perempuan bertanggungjawab terhadap 50 % produksi pangan dunia tetapi hanya menguasai 1 % saja dari *material good* yang ada. Sementara Bank Dunia dan Lembaga Penelitian Manajemen U I, menemukan bahwa perempuan menikmati upah yang lebih rendah di banding laki-laki sebagai kontribusinya pada produksi nasional. Di samping itu, perlindungan hukum bagi mereka juga rendah. Hal inilah yang menyebabkan akses perempuan terhadap sumber produksi menjadi lebih kecil dibandingkan laki-laki (Fakih, 1996 :14).

Dari beberapa bahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa *developmentalisme* sebagai suatu ideologi modern yang diciptakan oleh pemikir Barat dengan jargon untuk merubah keterbelakangan negara dunia ketiga adalah gagasan yang sangat kontroversial. Di satu pihak gagasan ini dipandang dapat memecahkan masalah kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami masyarakat dunia ketiga, tetapi di lain pihak, gagasan ini justru menjadi penyebab utama kesengsaraan berjuta-juta rakyat dunia ketiga, terutama bagi perempuan miskin yang terkooptasi dan

termarginalisasi oleh program ini. Dan WID yang semula dianggap sebagai satu-satunya gagasan untuk memperbaiki masyarakat perempuan dunia ketiga dianggap gagal karena dalam praktiknya ternyata lebih merupakan strategi dan diskursus pembangunanisme untuk melanggengkan penindasan terhadap perempuan dunia ketiga.

3. HASIL PENELITIAN EMPIRIS

King (1976), dalam penelitiannya di beberapa desa di Philipina menyatakan bahwa, keikutsertaan istri dalam angkatan kerja hanyalah sebagai pencari nafkah tambahan. Bila dirasa pendapatan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga, istri akan turun tangan dengan tanpa meninggalkan tugas utamanya sebagai pengurus rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh Reynold (1978), yang menyimpulkan, bahwa penghasilan suami merupakan salah satu faktor determinan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) wanita berstatus kawin, jika pendapatan suami/ pendapatan keluarga meningkat, maka TPAK wanita kawin akan rendah.

Artien Utreach (1985), sebagaimana dikutip Marhaeni (1991) dalam penelitiannya di pedesaan Jawa, menemukan bahwa tingkat partisipasi wanita dalam industri pedesaan Jawa relatif tinggi. Namun seperti di negara sedang berkembang lainnya, proses perkembangan industrialisasi di pedesaan kurang menguntungkan wanita, yaitu banyak ewanita yang bekerja pada pekerjaan rendah dengan upah yang rendah pula. Upah yang rendah tersebut menurut Partini

dalam Hardyastuti (1991 :10) merupakan strategi majikan untuk menekan biaya.

Tetapi kendatipun upah yang diterima pekerja wanita ini relatif rendah, Batty (1987) dalam studinya pada wanita pekerja di perusahaan rokok menemukan bahwa, sumbangan ekonomi yang diberikan pekerja wanita bagi keluarganya sangat tinggi, yaitu sebesar 77 -95 % dari total pendapatan rumah tangga. Hal ini dapat digunakan untuk mengukur besar kecilnya peranan wanita tersebut terhadap perekonomian atau kesejahteraan keluarganya.

Dengan memfokuskan pada penggunaan alokasi waktu kerja wanita, White (1973), sebagaimana dikutip Suratiyah (1983), menyimpulkan bahwa angka rata-rata jam kerja wanita baik untuk usaha tani maupun usaha mencari nafkah di luar tani dan pekerjaan rumah tangga lebih panjang dibandingkan pria, yaitu 11,1 jam per hari untuk wanita dan 8,7 jam per hari oleh pria. Dari waktu itu yang dicurahkan wanita untuk mencari nafkah adalah 5,9 jam / hari dan pria 7,9 jam. Sucipto (1980) dalam penelitiannya di Banjar Puseh , Kabupaten Badung, Bali juga membuat kesimpulan yang sama, yaitu bahwa total waktu yang dicurahkan wanita untuk seluruh kegiatannya (ekonomi maupun rumah tangga) adalah lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kenyataan lain yang ditemukan Sayogyo (1980), adalah bahwa semakin miskin wanita pedesaan tersebut, maka semakin banyak waktu yang dicurukannya untuk pekerjaan rumah tangga, karena terbatasnya akses yang dimilikinya untuk memasuki lapangan kerja, rendahnya kualitas yang dimiliki dan terhalangnya birokratis.

Hermawati (1992) dalam penelitiannya terhadap 60 responden wanita berstatus kawin yang bekerja di sektor informal di Desa Manding, Kabupaten Bantul Propinsi DIY menyimpulkan hal-hal sebagai berikut sebagai temuan penelitiannya :

- a. Dari 60 responden yang diteliti, 46 responden (77%) di antaranya tidak memiliki lahan, baik berupa sawah, tegalan maupun pekarangan, dan hanya 14 responden (23%) yang memiliki lahan, meskipun sempit (kurang dari 1000m²). Sempitnya kepemilikan lahan tersebut disebabkan oleh tiga hal, yaitu : (1). Penduduk di desa tersebut secara absolut terus bertambah, sehingga hal ini mempengaruhi semakin sedikitnya rasio kepemilikan tanah. (2). Areal pertanian semakin menyempit akibat perluasan perumahan, jaringan jalan, pembangunan sarana umum dan proyek pembangunan lainnya. (3). Mayoritas pekerja berasal dari kalangan keluarga miskin sehingga tak memiliki aset pemilikan tanah warisan dari orang tua mereka.
- b. Sebagai konsekuensi dari sempitnya kepemilikan lahan tersebut, maka keluarga responden tidak lagi bisa mengandalkan hidupnya dari sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian pokok, dan mendorong mereka untuk mencari tambahan penghasilan lain di luar sektor pertanian. Bagi suami responden, langkah yang ditempuh biasanya adalah tetap melakukan pekerjaan sawah (bagi yang punya lahan), sambil melakukan pekerjaan lain yang mendatangkan hasil, seperti bekerja sebagai tukang batu / buruh bangunan, tukang becak, bekerja di

industri kulit, menjadi kuli angkut dan sebagainya. Sedangkan bagi istri/ responden biasanya melakukan pekerjaan mencari nafkah yang dapat dilakukan tanpa mengganggu tugas pokoknya sebagai ibu rumah tangga, yaitu sebagai pekerja di industri kulit yang waktunya relatif fleksibel (bisa disesuaikan dengan waktu yang dimiliki responden), pekerjaan bisa dibawa pulang untuk dikerjakan pada

saat memiliki waktu luang atau mengambil sistem borongan yang waktu maupun pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan kapasitas waktu dan kemampuan pekerja.

- c. Total waktu yang dicurahkan responden untuk kedua pekerjaan (ekonomi dan domestik) ternyata lebih panjang dibanding suaminya, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1. Rata-rata Penggunaan Waktu Kerja Responden dan Suaminya Selama Seminggu

No	Subyek	Jam Kerja / minggu Untuk Pekerjaan Rumah Tangga	Jam Kerja / minggu Untuk Pekerjaan Mencari Nafkah	Total
1	Responden	51,5	30	81,5
2	Suami	50,2	13	63,2

Sumber : Hermawati, 1992

Tabel tersebut menggambarkan bahwa beban kerja wanita lebih berat dibanding pria. Lebih panjangnya jam kerja istri untuk kedua jenis pekerjaan ini adalah karena : (1) tugas utama responden adalah ibu rumah tangga, sehingga penanggung jawab terselesaikannya tugas rumah tangga tetap berada di tangannya. (2). Selain bekerja di tempat juragan, banyak responden yang membawa pekerjaannya untuk diselesaikan di rumah (memperpanjang waktu kerjanya) agar mendapat tambahan pendapatan

- (3). Ada sebagian responden yang bekerja penuh 7 hari selama seminggu, dengan jam kerja antara 7 -8 jam/ hari. Mereka ini adalah pekerja keluarga yang sering tidak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilaksanakannya.

- d. Meskipun jam kerja yang dicurahkannya relatif lebih panjang di banding pria, tetapi upah / penghasilan yang diterima oleh responden dalam pekerjaan dan waktu yang sama relatif lebih rendah, hal itu tampak dalam tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Rata-rata Penghasilan Responden, Suami dan Keluarga Selama Sebulan (Rp)

No	Subyek	Terendah	Tertinggi	Rata-rata
1	Responden	12.000,-	96.000,-	38.000,-
2	Suami	29.000,-	200.000,-	79.200,-
3	Keluarga	80.000,-	240.000,-	140.770,-

Sumber : Hermawati, 1992

Untuk menentukan cukup tidaknya pendapatan keluarga (yang merupakan penggabungan antara pendapatan suami dan istri) itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka pendapatan tersebut dibandingkan dengan standar Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) regional DIY (Saat penelitian dilaksanakan, besar KFM DIY adalah Rp 140.770 / bulan, untuk keluarga dengan anggota suami, istri dan dua orang anak). Atas dasar perbandingan tersebut diperoleh fakta bahwa 60% keluarga responden memiliki pendapatan dibawah KFM. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas keluarga responden berpendapatan rendah dan di bawah standar kelayakan.

- e. Meskipun pendapatan responden relatif rendah, tetapi pendapatan tersebut memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan keluarga. Dari hasil penelitian terungkap bahwa rata-rata kontribusi yang disumbangkan suami terhadap pendapatan keluarga adalah 58 %, dengan kontribusi terendah 17% dan tertinggi 88%. Sedangkan kontribusi Istri rata-rata adalah 30 %, dengan kontribusi terendah 5 % dan tertinggi 84%. Dari hasil penelitian terungkap, bahwa responden yang memiliki kontribusi tertinggi ternyata terdapat pada keluarga dimana suami berpenghasilan rendah. Kenyataan ini membuktikan bahwa kontribusi istri ini sangat berarti bagi keluarga yang kurang mampu.
- f. Dari hasil penelitian juga terungkap bahwa responden yang bekerja di industri kulit tidak pernah mendapatkan pelatihan yang

berkaitan dengan pekerjaannya sebagaimana yang dialami pria. Mereka secara informal belajar sendiri pada suami, orang tua atau teman dan juragan tempat ia bekerja. Ia juga tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk memperoleh ases kredit dari pemerintah, yang sebenarnya dapat digunakannya untuk mengembangkan usahanya secara mandiri dengan berwiraswasta, yang hasilnya relatif lebih tinggi dibanding bekerja sebagai buruh pada industri kerajinan kulit yang upahnya sangat jauh dari standar.

Setelah lima tahun berselang, tepatnya setelah krisis melanda (akhir 1997), Hermawati juga melakukan penelitian di daerah yang sama terhadap responden yang sama pula untuk mengetahui perkembangan kehidupannya. Dari hasil penelitian, terungkap bahwa 70 % perusahaan kulit di Sentra Kerajinan Kulit Manding telah gulung tikar / tak mampu memproduksi karena tingginya harga kebutuhan pokok akibat resesi ekonomi. Mereka terpaksa mengambil kebijakan untuk mem-PHK karyawannya, sehingga banyak karyawan yang kehilangan pekerjaannya. 30 % dari sejumlah perusahaan yang masih beroperasi, ternyata hanya mempekerjakan sedikit karyawan, sehingga untuk mencari 60 responden bukanlah hal yang mudah. Peneliti hanya berhasil menjangkit 35 responden (wanita berstatus kawin) di sentra industri kerajinan tersebut.

Dari 35 responden yang diteliti, ternyata 95% diantaranya tidak memiliki lahan pertanian, jam kerja yang dicurahkan relatif lebih pendek (4-5 jam / hari) dengan pertimbangan efisiensi (dari pihak juragan), sehingga otomatis

pendapatan yang diterimanya juga rendah. Dan hal yang sangat mengesankan adalah mereka tidak lagi mampu memberi makan keluarganya 3 kali sehari seperti sebelumnya, meskipun dengan menu yang sederhana; banyak anak-anak mereka yang terpaksa *drop out* dari sekolah dan ikut terjun ke lapangan sebagai pekerja anak semata demi mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya; bahkan tidak jarang perempuan desa yang demikian lugu dan teguh mempertahankan ajaran agamanya terpaksa harus menjalani kehidupan malam atas persetujuan suaminya, karena mereka tidak melihat celah lain untuk menghidupi keluarganya setelah suami istri tersebut di PHK dan kehilangan sumber pendapatan untuk menghidupi keluarganya. Mereka benar-benar merasa tak berdaya dalam mengatasi beban hidup yang semakin hari semakin bertambah berat tersebut, dan pikiran sederhana mereka hanya merasa bahwa semua yang dialaminya adalah takdir Tuhan yang memang harus mereka terima dengan ikhlas tanpa menyalahkan siapapun.

4. SIMPULAN DAN ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

Dengan menyimak paparan di atas dan dengan ditunjang oleh hasil penelitian yang relevan, maka kiranya dapat diperoleh beberapa kesimpulan umum sebagai berikut:

1. Bahwa pembangunan/perubahan yang terjadi di pedesaan telah menyebabkan terjadinya marginalisasi terhadap perempuan dan menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan. Banyak kasus

terjadi, dengan adanya mekanisme baru yang menyertai mekanisasi dan teknologi desa beserta penerapannya yang lebih bersifat birokratis, top down dan sarat dengan dominasi pria, banyak wanita yang harus kehilangan mata pencaharian di sektor pertanian dan kehilangan hak-haknya atas sumber-sumber baik berupa: aset lahan dan modal, atas penguasaan teknologi, atas pendidikan, atas pengambilan keputusan, atas perlindungan hukum, atas aset kredit, atas upah kerja dan sebagainya yang lebih mencerminkan ketidakadilan gender dan mengkooptasi mereka pada dominasi kelompok ordnat dalam berbagai aspek kehidupannya.

2. Akibat dari kondisi sebagaimana disebutkan pada point 1 di atas, maka banyak wanita pedesaan yang pada umumnya miskin dan terbelakang menjadi bertambah miskin dan terpuruk, dengan beban hidup yang semakin berat, sehingga mereka terpaksa harus mencari alternatif kerja lain di luar sektor pertanian, meskipun dengan upah yang relatif rendah dibanding pria, meskipun dalam pekerjaan dan jam kerja yang sama. Untuk memperoleh pendapatan yang relatif cukup, pekerja terpaksa harus memperpanjang jam kerjanya, sehingga total jam kerja wanita untuk pekerjaan rumah tangga dan mencari nafkah relatif lebih tinggi dibandingkan pria. Akibat lain yang ditanggung wanita dan keluarganya karena kondisi ini adalah terjadinya malnutrisi dan kekurangan gizi, yang berkorelasi secara signifikan dengan kemiskinan yang dialaminya; banyaknya anak mereka yang terpaksa *drop out* sekolah dan

terpaksa menjadi pekerja anak untuk membantu beban kerja orang tuanya; rendahnya kualitas kesehatan dan minimnya prasarana hidup mereka dan sebagainya.

3. Karena pendidikan dan kualitas kerja pekerja wanita ini relatif rendah, maka kesempatannya untuk memasuki lapangan kerja menjadi terbatas, dan walaupun mereka tertampung di dalam lapangan kerja adalah pada pekerjaan kelas rendah dengan upah yang rendah pula. Bahkan tidak jarang, wanita pedesaan ini terpaksa menjalani profesi sebagai prostitusi, karena tidak ada alternatif kerja lain, semata-mata hanya untuk memperoleh sedikit penghasilan yang dapat digunakannya untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya.
4. Meskipun pendapatan pekerja wanita pedesaan ini relatif rendah, tetapi pendapatan ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penghasilan keluarga, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah, dimana penghasilan suami tidak mencukupi untuk menopang kehidupan keluarganya atau bahkan tidak ada pendapatan sama sekali yang disumbangkannya.
5. Karena sistem dan struktur yang ada di pedesaan lebih didominasi oleh pria, maka perempuan berada pada status sosial yang rendah, dan ini menyebabkan wanita mempunyai pengaruh yang kecil atau sama sekali tidak dilibatkan (diabaikan) dalam proses pengambilan keputusan oleh masyarakat / negara, sehingga kebutuhan dan kepentingan wanita

menjadi tersisihkan, seperti dalam keputusan untuk menggunakan dana-dana pembangunan dari masyarakat / desa. Tetapi sejak reformasi bergulir, banyak upaya-upaya advokasi baik dari GO dan NGO, untuk memperjuangkan hak-hak atas wanita yang selama pelaksanaan pembangunan terabaikan dan organisasi ini juga melakukan upaya-upaya penyadaran dan pendidikan politis bagi mereka, sehingga secara perlahan-lahan posisi wanita ini bergerak naik, dan sedikit demi sedikit hak-haknya mulai diperhatikan dan diperjuangkan serta dilegitimasi dalam perundang-undangan negara dan program-program pembangunan yang digulirkan pemerintah.

Atas dasar kenyataan-kenyataan sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai alternatif pemecahan perlu diadakan perubahan-perubahan secara struktural dengan implikasi-implikasi yang lebih jauh. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya :

1. Secara Makro :

- a. Perspektif kebijakan pembangunan di negara sedang berkembang, khususnya di Indonesia hendaknya diidentifikasi sebagai perspektif yang berdasarkan hasil refleksi atas realitas hidup petani, pertanian, dan kondisi riil pedesaan, dengan tetap mempertimbangkan aspek gender di dalamnya. Dengan demikian program pembangunan, terutama dalam bidang pertanian hendaknya didasarkan pada konsep kerakyatan yang lebih bersifat Bottom Up, dan dapat menjamin peningkatan produksi, intensifitas skill dan penyerapan tenaga kerja secara

berimbang. Atau dengan meminjam istilah Kortzen (1984), pembangunan yang dilaksanakan hendaknya berpusat pada rakyat (*people center*) dan lingkungannya dan bukan pada profil dan produksi sebagaimana diskursus developmentalisme yang lebih berorientasi pertumbuhan. Di samping itu, pembangunan yang dilaksanakan hendaknya juga menciptakan kesetaraan gender, sehingga terjadi keseimbangan antar dan inter generasi. Pembangunan yang dilaksanakan ini menurut Eade (1995) hendaknya dapat mengembangkan kapasitas secara intelektual, organisasi sosial, politik, kultur, material dan finansial yang mendukung kerja organisasi yang berkeadilan sosial bagi pria maupun wanita yang sama-sama punya andil besar dalam mengarahkan pembangunan yang dapat menghasilkan perubahan-perubahan yang positif dalam kehidupan mereka.

- b. Perlu dibangunnya organisasi yang dapat menjamin kebutuhan petani, menampung aspirasi dan gagasan mereka, serta dapat mengembangkan kapasitasnya secara memadai, sehingga posisi tawar (*bargaining position*) petani menjadi kuat, dan tingkat partisipasi serta emansipasinya dalam program-program pembangunan yang berorientasi kerakyatan ini dilaksanakan relatif meningkat.
- c. Perubahan yang terjadi di pedesaan hendaknya diarahkan pada perubahan mengenai struktur agraris terutama yang terkait

dengan pendistribusian yang lebih merata pada jangkauan terhadap sumber-sumber ekonomi dan kesempatan (termasuk lahan, kredit, modal, pendidikan, kesempatan kerja, pelayanan pemerintah dan sebagainya), sehingga dapat menampung tenaga kerja yang tidak memiliki lahan atau tergusur dari masuknya teknologi dan mekanisasi di bidang pertanian, tanpa melakukan migrasi dan urbanisasi ke kota. Sebab urbanisasi ini pada dasarnya mendatangkan persolan baru bagi kedua belah pihak, yaitu kota dalam keterbatasannya menampung tenaga kerja dan penyediaan sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta desa yang kehilangan sumber daya manusianya yang sangat potensial untuk mengembangkan wilayahnya, sehingga kesenjangan antara kota-desa dapat diminimalisir

2. Secara Mikro (Khusus yang berkenaan dengan Wanita)

- a. Dalam perancangan program pembangunan dan pengambilan keputusan), hendaknya peran dan kebutuhan wanita dipertimbangkan, mengingat unit pokok pembangunan pedesaan adalah bukan petani tetapi rumah tangga pedesaan yang tidak menutup kemungkinan kepala rumahtangganya adalah seorang wanita, karena tiadanya suami atau adanya suami tetapi mereka tidak berfungsi secara ekonomis karena sesuatu hal. Hal ini perlu diperhatikan agar hak-hak wanita

- pedesaan terpenuhi dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pembangunan menjadi terintegrasi dengan baik.
- b. Teknologi baru dengan teknik sederhana perlu dikenalkan pada wanita pedesaan, sehingga dapat meringankan beban kerjanya yang sudah berat, sehingga dengan demikian wanita dapat lebih dapat mencurahkan waktunya untuk kegiatan produktif.
 - c. Adanya jaminan dari pemerintah, terutama dalam memperbaiki upah buruh, terutama buruh wanita, sehingga mereka dapat memperoleh pendapatan yang relatif memadai dari waktu yang dicurahkannya dalam pekerjaan / kegiatan ekonomis.
 - d. Pendidikan dan pelatihan bagi wanita pedesaan mutlak diperlukan agar kualitasnya meningkat dan mereka dapat bersaing di lapangan kerja dengan upah kerja yang lebih memadai. Dalam pelaksanaannya, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan terhadap wanita pedesaan ini lebih menerapkan prinsip-prinsip andragogik, berdasarkan kebutuhan yang mereka rasakan serta dilaksanakan secara non formal dengan menyesuaikan waktu dan kesempatan yang mereka miliki.
 - d. Wanita pedesaan perlu dilibatkan secara aktif dalam organisasi-organisasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan maupun kegiatan produktif, sehingga kapasitasnya dan partisipasinya berkembang, serta aspirasi dan gagasannya

dapat ditampung atau diperjuangkan dalam penentuan kebijakan yang akan diambil.

Dengan upaya-upaya pemecahan yang penulis tawarkan di atas, diharapkan posisi tawar wanita pedesaan meningkat, sehingga mereka dapat meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan mencari nafkah dan kegiatan lainnya serta dapat mengikuti perkembangan / perubahan yang terjadi akibat kemajuan jaman. Ini berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan hendaknya berorientasi pada manusia yang melaksanakannya tanpa membedakan gender dan dapat mereka kendalikan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada, sehingga distorsi terhadap gender yang melanggengkan diskriminasi dan penindasan terhadap wanita dalam pembangunan dapat dihilangkan.

PUSTAKA ACUAN

- Batty, zarina, 1987. *Economic Contribution of Women The Household Budgeted : A Case Study of Beedi Industry* dalam Andean Menefee Singh dan Kelles Vitoneen, eds. *Invisible Hand Women in Home Based Production*. New Delhi : Sage Publication, India Put.
- Fakih, Mansour, 1996. *Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour, 2000. *Tinjauan Kritis Terhadap Revolusi Hijau*. Dalam *Menggeser Pembangunan Memperkuat Rakyat*, Yogyakarta : Laper Pustaka Utama.

- Hardyastuti, Suhatmini, 1991. *Pekerja Industri di Industri Rumah Tangga Sandang di Propinsi DIY*. Yogyakarta: PPK UGM.
- Hermawati, Istiana, 1992. *Faktor-faktor Determinan Yang Mempengaruhi Alokasi Waktu Ibu Rumah Tangga Mencari Nafkah di Sektor Informal Pada Industri Kerajinan Kulit Manding Bantul Propinsi DIY*. Yogyakarta: Skripsi S1
- Hermawati, Istiana, 1997. *Kaji Ulang Tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Wanita Berstatus Kawin Bekerja di Sektor Informal Pada Tiga Desa di Kabupaten Bantul Propinsi DIY*. Yogyakarta: B2P3KS.
- King, E. M, 1996. *Time Allocation in Philipine Rural Household*. Paper Presented at The A/D/C Workshop in Studies at Singapore.
- Marhaeni, A.A. I Ngurah, 1991. *Alokasi Waktu Pekerja Wanita Pada Industri Garmen di Daerah Sanur Kecamatan Denpasar Selatan*. Yogyakarta: Tesis Pasca Sarjana UGM
- MC. Clelland, David, 1961. *The Achieving Society*. New York : D. Von Nostyrad.
- Mosse, Julia Cleves, 1996. *Gender dan Pembangunan (Terjemahan)*. Yogyakarta : Kerjasama Pustaka Pelajar dengan Rifka Annisa Women's Cricis Centre.
- Reynolds, Lloyd.S,1978. *Labour Economic and Labour Relation*. New Delhi: Prenticee Hall of India Private Limited.
- Rostow, WW, 1960. *The Stages of Economic Growth : A Non Communist Manifesto* . New York : Cambridge University Press.
- Sayogya, Pujiwati,1983. *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Pedesaan*. Jakarta :CV Rajawali.
- Suratiyah, Ken, dkk, 1983. *Peranan Wanita dalam Penghasilan Keluarga Petani*, Yogyakarta : PPK UGM.
- White, B. dan Endang LS,1980. *Subordinasi Tersembunyi: Pengaruh Pria dan Wanita dalam Kegiatan Rumah Tangga dan Masyarakat di Dua Desa di Jawa barat*. Bogor: Lembaga Penelitian Sosial Pedesaan IPB